



**LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2015**



**BAGIAN ORGANISASI  
SETDA KAB. KARANGASEM**



## **EKSKUTIF SUMMARY**

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2010-2015 dan Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015. Penyusunan LAKIP Tahun 2015 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2015. Selain itu LAKIP merupakan bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, maupun pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya.*

*Selain yang telah disampaikan sebelumnya, LAKIP juga disusun sebagaimana amanat Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan dalam kurun waktu tahun 2015.*

*Selain itu Pemerintah Kabupaten Karangasem beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Karangasem, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.*

*Dalam LAKIP ini disajikan pengukuran kinerja berikut dengan penjelasan tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan serta langkah*



*antisipasi yang akan diambil di masa mendatang dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang dipakai pada pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), hasil (Output) dari kegiatan tahun 2015 sedangkan manfaat (benefit) dan dampak (impact) sebagian besar belum bisa diukur karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa dilakukan penelitian.*

*Tahun 2015, merupakan tahun akhir RPJMD 2010 – 2015 Kabupaten Karangasem. Pelaksanaan berbagai indikator kinerja masing-masing SKPD sangat menentukan keberhasilan capaian sasaran yang tertuang dalam tujuan dari Pembangunan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama periode RPJMD.*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu dari Delapan Kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Meningkatkan pertumbuhan pembangunan di segala bidang serta percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan program dan terobosan yang harus dilaksanakan. Kesehatan masyarakat, pengurangan dan pengentasan kemiskinan, promosi pariwisata, merupakan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan cabang untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk wilayah yang belum terjangkau oleh PDAM, pengembangan pembibitan dan pemeliharaan udang untuk kualitas ekspor, pengiriman tenaga magang ke Jepang, merupakan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam upaya menggerakkan seluruh potensi pembangunan yang ada di Kabupaten Karangasem, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Untuk mendukung pelaksanaan semua program perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem, berdasarkan



Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.

Kabupaten Karangasem yang terletak di ujung timur Pulau Bali. Secara astronomis berada pada posisi 8°00'00-8°41'37,8 Lintang Selatan dan 115°35'9,8-115°54'8,9 Bujur Timur. Posisi tersebut mengakibatkan wilayahnya beriklim tropis, dengan luas wilayah 839,54 KM<sup>2</sup>. Kabupaten Karangasem merupakan Kabupaten terluas nomor 3 di Provinsi Bali setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Secara topografi 43,5% wilayahnya berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah berupa perbukitan. Adapun batas wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Bali
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Klungkung, Bangli dan Kabupaten Buleleng
- Sebelah Timur : Selat Lombok

Dilihat dari penguasaan tanahnya, 7.140 Ha. Merupakan lahan persawahan. Sedangkan yang bukan lahan sawah 76.814 Ha. Mata pencaharian penduduk sebagian besar berada pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Seni budaya yang dimiliki Kabupaten Karangasem menjadi daya tarik tersendiri bagi peningkatan daya tarik wisatawan domestik maupun



asing. Seperti halnya seni tari dan karawitan, tradisi megeret pandan, gebug ende, ter-teran (perang api), dll. Untuk kawasan daya tarik wisata ada 15 (lima belas) kawasan wisata yaitu : Besakih, Jemeluk, Putung, Yeh Malet, Padang Bai, Tirta Gangga, Iseh, Tenganan, Tulamben, Taman Ujung, Candi Dasa, Bukit Jambul, Sibetan, Tlaga Waja, Puri Agung. Disamping 15 kawasan Obyek Daya Tarik Wisata tersebut Kabupaten Karangasem memiliki satu pelabuhan Kapal pesiar (Pelabuhan cruise) yang letaknya di Desa Tanah Ampo Kecamatan Manggis, selain itu juga ada gedung BDS Tanah Aron/Usaha Kecil Menengah(UKM) centre yang merupakan sentra usaha kerajinan masyarakat di Kabupaten Karangasem.

Berbagai macam potensi dan kegiatan yang termaktub pada rencana kerja tahun 2015 di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan melihat output dan outcome berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, yang nantinya pencapaian sasaran output dan outcome kegiatan dimaksud akan diukur melalui laporan yang terangkai secara sistematis melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2015.

Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2015 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Pembuatan LAKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan Taktis Strategis, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan RPJMD selama satu tahun anggaran.



## B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2015 adalah dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 terbagi dalam Sasaran Strategis dengan berorientasi pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2015 yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja berdasarkan program kegiatan Kabupaten Karangasem Tahun 2015 disusun dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2015 serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Karangasem Tahun 2015.

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Rencana Kinerja Kabupaten Karangasem Tahun 2015 memuat substansi pokok sebagai berikut :

1. Skala prioritas pembangunan daerah;
2. Prioritas program untuk masing-masing urusan;
3. Plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Rencana Kinerja Kabupaten Karangasem Tahun 2015 disusun antara lain berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewenangan dan urusan wajib;
2. Kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat;
3. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Efektivitas dan efisiensi anggaran.





Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai langkah awal pembangunan yang tersusun dalam Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015, merupakan suatu proses dari rangkaian usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

## **1. Visi**

Sejalan dengan perkembangan waktu pada periode 2005-2010 saat kepemimpinan pertama bupati terpilih telah dicapai kemajuan di segala bidang namun masih ada yang belum tercapai serta belum optimal. Untuk itu pada periode terpilih yang kedua kalinya 2010-2015 perlu dilanjutkan Visi dan Misi periode 2005-2010.



Oleh karenanya, untuk membangun Karangasem yang lebih baik di masa mendatang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem 2010-2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan namun juga mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Karangasem maka Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem adalah:

**” MEWUJUDKAN KARANGASEM JAGADITHA YA CA ITI DHARMA  
PERIODE II ”**

## **2. Misi**

RPJMD Kabupaten Karangasem 2010-2015 telah memasuki tahun ke-5 (Lima) RPJMD dalam rangka mewujudkan Karangasem kedepan menjadi lebih baik dengan mencermati isu-isu strategis, baik yang bersifat internal (kekuatan dan kelemahan) maupun bersifat eksternal (peluang dan tantangan). Globalisasi dalam pasar bebas merupakan peluang bagi sumber daya manusia Karangasem untuk dapat berkibrah, baik ditingkat daerah, nasional maupun ditingkat global.

Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan mempertimbangkan



peluang yang dimiliki, untuk menuju “ *Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode II* “ maka rumusan Misi Kabupaten Karangasem dalam pencapaian Visi Karangasem 2010-2015 ditetapkan dalam 3 Misi yaitu:

1. **Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Bebas KKN**
2. **Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan**
3. **Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan**

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan untuk menuju “ *Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode II* “ dapat dijabarkan dalam tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karangasem Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

### VISI

**Mewujudnya Karangasem yang “Jagatdita Ya Ca Iti Dharma Periode II ”**

### Penjabaran Visi

Penjabaran Visi diatas sebagai berikut :

Kabupaten Karangasem	:	merupakan satu kesatuan wilayah dan masyarakat beserta segala potensi yang ada.
Jagatdita	:	membangun Karangasem menuju masyarakat yang <b>Sejahtera.</b>
Ya Caiti Dharma	:	mewujudkan <b>nilai-nilai kebenaran yang universal.</b>

### MISI

No	Misi
1	Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN
2	Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan
3	Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan



## TUJUAN

No	Tujuan
<b>Misi 1 :</b>	Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN
1.1	Optimalisasi Pelayanan
1.2	Pendayagunaan dan peningkatan kompetensi aparatur
<b>Misi 2 :</b>	Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan
2.2	Pendayagunaan potensi dan pemanfaatan SDA berkelanjutan
2.2	Peningkatan investasi berwawasan lingkungan
<b>Misi 3 :</b>	Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan
3.1	Pengentasan kemiskinan bertahap dan komprehensif
3.2	Kesejahteraan Sosial
3.3	Tercapainya kualitas hidup masyarakat
3.4	Terwujudnya taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan

## SASARAN

No	Sasaran
<b>Tujuan 1</b>	Optimalisasi Pelayanan :
1.1	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
1.2	serta bebas KKN Mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah didukung perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiartif
<b>Tujuan 2</b>	Pendayagunaan dan peningkatan kompetensi aparatur :
2.1	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
2.2	Meningkatnya kapasitas kepemimpinan
<b>Tujuan 3</b>	Pendayagunaan potensi dan pemanfaatan SDA berkelanjutan
3.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
3.2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
<b>Tujuan 4</b>	Peningkatan investasi berwawasan lingkungan
4.1	Jumlah ijin investasi yang diterbitkan sesuai prosedur
4.2	Meningkatnya lapangan kerja
<b>Tujuan 5</b>	Pengentasan kemiskinan bertahap dan komprehensif
5.1	Menurunnya jumlah penduduk miskin
5.2	Meningkatnya jumlah rumah tangga sejahtera
<b>Tujuan 6</b>	Kesejahteraan Sosial
6.1	Menurunnya jumlah masyarakat yang menggepeng
6.2	Menurunnya jumlah masyarakat penyandang sosial



- Tujuan 7** Tercapainya kualitas hidup masyarakat
- 7.1 Meningkatnya kualitas pendidikan
  - 7.2 Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Tujuan 8** Terwujudnya taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan
- 8.1 Meningkatnya pelayanan kesehatan

### 3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan dari ketiga misi tersebut akan dilaksanakan dalam tahun ke-lima RPJMD melalui indikator sasaran sebagai berikut :

#### INDIKATOR SASARAN

No	Indikator Kinerja	Satuan	IKU
<b>Sasaran 1</b>	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas KKN.		
1.1	Jumlah SKPD yang dibina Gerakan Disiplin Nasional (GDN)	SKPD	✓
1.2	Jumlah SKPD yang dibina Pelayanan Publik	Kategori	
1.3	Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Karangasem	Skor	
1.4	Nilai Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	Opini	
1.5	Hasil audit laporan keuangan oleh BPK	%	
1.6	Jumlah SKPD dengan IKM "Baik"	SKPD	
<b>Sasaran 2</b>	Mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah didukung perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiratif.		
2.1	Persentase penurunan disparitas pembangunan antar wilayah kecamatan setiap tahun	%	✓
2.2	Jumlah masyarakat yang ikut dalam Musrenbang Kabupaten setiap tahun	Orang	
<b>Sasaran 3</b>	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur		
3.1	Jumlah PNS yang telah lulus penjurusan pendidikan S1	Orang	✓
3.2	Jumlah PNS yang telah mengikuti Bintel SAKIP	Orang	



3.3	Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan tugas belajar	Orang	
<b>Sasaran 4</b>	Meningkatnya kapasitas kepemimpinan		
4.1	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat Pim.	Orang	✓
4.2	Jumlah pejabat yang telah lulus tes kompetensi eselon II	Orang	
<b>Sasaran 5</b>	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi		
5.1	Persentase pertumbuhan pdrb Kabupaten per tahun	%	✓
5.2	Jumlah rata-rata penyerapan tenaga kerja per tahun	Orang	
<b>Sasaran 6</b>	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		
6.1	Jumlah rata-rata pendapatan perkapita masyarakat	Rp.	✓
6.2	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapat pembinaan KUBE Fakir Miskin	Orang	
<b>Sasaran 7</b>	Meningkatnya ijin investasi yang diterbitkan sesuai prosedur		
7.1	Jumlah rata-rata ijin yang diterbitkan per bulan	Buah	✓
7.2	Jumlah rata-rata investor yang mohon ijin per bulan	Buah	
<b>Sasaran 8</b>	Meningkatnya lapangan kerja		
8.1	Jumlah rata-rata investor yang berinvestasi per tahun	Orang	✓
8.2	Jumlah rata-rata penyerapan tenaga kerja per tahun	Orang	
<b>Sasaran 9</b>	Menurunnya jumlah penduduk miskin		
9.1	Persentase penurunan RTM per tahun	%	✓
9.2	Jumlah RTM menjadi RTS per tahun	Buah	
<b>Sasaran 10</b>	Meningkatnya jumlah rumah tangga sejahtera		
10.1	Persentase meningkatnya jumlah RTS per tahun	%	✓
10.2	Jumlah rata-rata daya beli masyarakat per hari	Rp.	
<b>Sasaran 11</b>	Menurunnya jumlah masyarakat yang menggepeng		
11.1	Jumlah masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap	Orang	✓



11.2	Jumlah masyarakat yang memiliki keterampilan kerja	Orang	
<b>Sasaran 12</b>	<b>Menurunnya jumlah masyarakat penyandang sosial</b>		
12.1	Jumlah penyandang sosial yang mendapat pelatihan keterampilan kerja	Orang	✓
12.2	Jumlah yayasan yang menampung masyarakat penyandang sosial	Buah	
<b>Sasaran 13</b>	<b>Meningkatnya kualitas pendidikan</b>		
13.1	Persentase capaian Angka melek hurup	%	✓
13.2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	
<b>Sasaran 14</b>	<b>Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi</b>		
14.1	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kelompok	✓
14.2	Jumlah pelatihan pemanfaatan TI	Orang	
<b>Sasaran 15</b>	<b>Meningkatnya pelayanan kesehatan</b>		
15.1	Persentase Balita gizi buruk	%	✓
15.2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	
15.3	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan, serta dengan mempertimbangkan kondisi, potensi daerah, maka arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang ditempuh adalah pemulihan perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemulihan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diupayakan melalui peningkatan investasi, konsumsi masyarakat, peningkatan ekspor termasuk peningkatan sektor pariwisata, peningkatan peran UMKM, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.



Pembangunan ekonomi bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu sektor pertanian dalam arti luas, industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor pariwisata. Ketiga sektor ini disamping mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian daerah, juga mampu membuka peluang berusaha, peluang kerja serta peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.





### BAB III CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Tahun 2015 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian Visi Misi Kabupaten. Akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan satu sama lainnya, dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan penilaian kinerja akan diukur melalui penerapan sistem tersebut. Sehingga hal ini dapat menggambarkan suatu sistem yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Karangasem telah menyusun Evaluasi Kinerja berbasis laporan pelaksanaan anggaran yang dicapai dan diakumulasi terhadap 16 sasaran strategis dalam upaya mewujudkan visi misi kabupaten agar tercapai realisasi pelaksanaannya.

Evaluasi kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Pemerintah Kabupaten. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Dalam evaluasi diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.



Realisasi kinerja atas dasar rencana kinerja tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Karangasem sesuai dengan formulasi melalui target indikator sasaran sebagai berikut :

### TARGET INDIKATOR SASARAN

No	Indikator Kinerja	2015
1.1	Jumlah SKPD yang dibina Gerakan Disiplin Nasional (GDN).	42 Skpd
1.2	Jumlah SKPD yang dibina Pelayanan Publik.	26 Skpd
1.3	Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Karangasem	BB
1.4	Nilai Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	3.000
1.5	Hasil audit laporan keuangan oleh BPK	WDP
1.6	Jumlah SKPD dengan IKM "Baik"	3
2.1	Persentase penurunan disparitas pembangunan antar wilayah kecamatan per tahun .	60 %
2.2	Jumlah masyarakat yang ikut dalam musrenbang kabupaten per tahun.	300 or
3.1	Jumlah PNS yang telah lulus penjenjangan pendidikan S1.	5 or
3.2	Jumah PNS yang telah mengikuti Bintek SAKIP.	102 or
4.1	Jumah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat Pim.	250 or
4.2	Jumlah pejabat yang telah lulus tes kompetensi eselon II.	0 or
5.1	Persentase pertumbuhan pdrb kabupaten per tahun.	5,6 %
5.2	Jumlah rata-rata penyerapan tenaga kerja per tahun.	1.200 or
6.1	Jumlah rata-rata pendapatan perkapita masyarakat.	Rp. 1,5



6.2	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapat pembinaan KUBE Fakir Miskin	500 or
7.1	Jumlah rata-rata ijin yang diterbitkan per bulan.	57 buah
7.2	Jumlah rata-rata investor yang mohon ijin per bulan.	67 or
8.1	Jumlah rata-rata investor yang berinvestasi per tahun.	150 or
8.2	Jumlah rata-rata tenaga kerja yang diterima per tahun.	75 or
9.1	Persentase penurunan RTM per tahun.	2,5 %
9.2	Jumlah RTM menjadi RTS per tahun.	25 RTS
10.1	Persentase meningkatnya jumlah RTS per tahun.	3,1 %
10.2	Jumlah rata-rata daya beli masyarakat per hari.	Rp. 300.000
11.1	Jumlah masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap.	750 or
11.2	Jumlah masyarakat yang memiliki keterampilan kerja.	1.200 or
12.1	Jumlah penyandang sosial yang mendapat pelatihan keterampilan kerja.	45 or
12.2	Jumlah yayasan yang menampung masyarakat penyandang sosial.	6 buah
13.1	Persentase capaian Angka melek huruf	79,44
13.2	Angka rata-rata lama sekolah	12
14.1	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	78
14.2	Jumlah pelatihan pemanfaatan TI	80
15.1	Persentase Balita gizi buruk	<1
15.2	Angka Kematian Ibu	22,8
15.3	Angka Kematian Bayi	5



Capaian atas realisasi akuntabilitas kinerja berdasarkan Target Indikator Sasaran melalui indikator kinerja tersebut diatas merupakan bagian dari program per sasaran yang teraplikasi sesuai bagan program sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karangasem Tahun 2015 seperti bagan sebagai berikut :

### PROGRAM PER SASARAN

No	Program
<b>Sasaran 1 :</b>	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas KKN.
<b>Sasaran 2 :</b>	Mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, didukung perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiartif.
<b>Sasaran 3 :</b>	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur.
<b>Sasaran 4 :</b>	Meningkatnya kapasitas kepemimpinan.
<b>Sasaran 5 :</b>	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
<b>Sasaran 6 :</b>	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
<b>Sasaran 7 :</b>	Meningkatnya ijin investasi yang diterbitkan sesuai prosedur.
<b>Sasaran 8 :</b>	Meningkatnya lapangan kerja.
<b>Sasaran 9 :</b>	Menurunnya jumlah penduduk miskin.
<b>Sasaran 10:</b>	Meningkatnya jumlah rumah tangga sejahtera.
<b>Sasaran 11 :</b>	Menurunnya jumlah masyarakat yang menggepeng.
<b>Sasaran 12 :</b>	Menurunnya jumlah masyarakat penyandang sosial.
<b>Sasaran 13 :</b>	Meningkatnya kualitas pendidikan
<b>Sasaran 14 :</b>	Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
<b>Sasaran 15 :</b>	Meningkatnya pelayanan kesehatan



## IKU KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015

No	IKU	Formulasi
1	Jumlah SKPD yang dibina Gerakan Disiplin Nasional (GDN).	Jumlah SKPD (-) SKPD dalam Zona Hijau.
2	Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Karangasem.	Nilai hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Karangasem dari Katagori B menjadi Katagori BB.
3	Nilai Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.	Skor evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, minimal 3.000.
4	Hasil audit laporan keuangan oleh BPK.	Opini audit laporan keuangan oleh BPK, WDP.
5	Persentase penurunan disparitas pembangunan antar wilayah kecamatan.	Jumlah APBD BL tahun lalu (+) Jumlah APBD BL tahun ini (: ) Jumlah APBD BL semua wilayah Kecamatan (X) 100 %.
6	Jumlah PNS yang telah mengikuti Bintek SAKIP	Jumlah Kasubag Sunprog (+) Jumlah Kepala SKPD.
7	Persentase pertumbuhan pdrb Kabupaten per tahun.	PDRB Tahun ini (-) PDRB Tahun lalu (: ) PDRB Tahun lalu (X) 100 %.
8	Jumlah rata-rata pendapatan perkapita masyarakat.	PDRB tahun lalu (: ) jumlah penduduk pada tahun lalu.
9	Jumlah rata-rata ijin yang diterbitkan per bulan.	Jumlah permohonan ijin yang masuk per tahun (-) jumlah permohonan ijin yang tidak lengkap per tahun (: ) dua belas.
10	Jumlah rata-rata penyerapan tenaga kerja per tahun.	Jumlah tenaga kerja yang tersedia (-) Jumlah tenaga kerja yg tidak diterima (: ) dua belas.
11	Persentase penurunan RTM per tahun.	Jumlah RTM per tahun (-) Jumlah RTS per tahun (: ) Jumlah RTM per tahun (X) 100 %.
12	Persentase meningkatnya jumlah RTS per tahun.	Jumlah RTS per tahun (-) Jumlah RTM per tahun (: ) Jumlah RTS per tahun (X) 100 %.
13	Jumlah masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap.	Jumlah masyarakat pencari kerja (-) jumlah masyarakat yg tidak mendapat lowongan kerja.
14	Jumlah penyandang sosial yang mendapat pelatihan keterampilan kerja.	Jumlah masyarakat penyandang sosial (-) Jumlah masyarakat penyandang sosial yg tidak memiliki keterampilan kerja.



15	Persentase capaian Angka melek hurup	Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis (/) jumlah penduduk usia di atas 15 tahun
16	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina
17	Persentase Balita gizi buruk	umlah balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita seluruhnya X 100%

**PENGUKURAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
<b>Visi : Mewujudnya Karangasem yang “Jagatdita Ya Ca Iti Dharma”</b>			
<b>Misi I : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN</b>			
<b>Tujuan 1 : Optimalisasi Pelayanan</b>			
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas KKN.	- Jumlah SKPD yang dibina Gerakan Disiplin Nasional (GDN)	42 SKPD	42 SKPD
	- Jumlah SKPD yang dibina Pelayanan Publik	26 SKPD	26 SKPD
	- Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Karangasem	BB	B
	- Nilai Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	3.000	2.714
	- Hasil audit laporan keuangan oleh BPK	WDP	WDP
	- Jumlah SKPD dengan IKM "Baik"	3	3
Mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah didukung perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiratif	- Persentase penurunan disparitas pembangunan antar wilayah kecamatan per tahun .	2,1 %	-
	- Jumlah masyarakat yang ikut dalam musrenbang kabupaten per tahun.	50 or	200 or
<b>Tujuan 2 : Pendayagunaan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur</b>			
Meningkatnya sumber daya aparatur	- Jumlah PNS yang telah lulus penjurusan pendidikan S1.	5 or	0 or
	- Jumlah PNS yang telah mengikuti Bintek SAKIP.	102 or	102 or



Meningkatnya kapasitas kepemimpinan	-	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat Pim.	250 or	76 or
	-	Jumlah pejabat yang telah lulus tes kompetensi eselon II.	0 or	0 or
<b>Misi II : Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan</b>				
<b>Tujuan 3: Pendayagunaan Potensi dan Pemanfaatan SDA Berkelanjutan</b>				
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	-	Persentase pertumbuhan pdrb kabupaten per tahun.	5,6 %	6,01%
	-	Jumlah rata-rata penyerapan tenaga kerja per tahun.	1.200 or	1.368 or
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	-	Jumlah rata-rata pendapatan perkapita masyarakat.	Rp. 1,5	
	-	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapat pembinaan KUBE Fakir Miskin.	500 or	500 or
<b>Tujuan 4 : Peningkatan Investasi Berwawasan Lingkungan</b>				
Meningkatnya ijin investasi yang diterbitkan sesuai prosedur	-	Jumlah rata-rata ijin yang diterbitkan per bulan.	57 buah	129 buah
	-	Jumlah rata-rata investor yang mohon ijin per bulan.	67 or	140 or
Meningkatnya lapangan kerja	-	Jumlah rata-rata investor yang berinvestasi per tahun.	150 or	
	-	Jumlah rata-rata tenaga kerja yang diterima per tahun.	75 or	336 or
<b>Misi III : Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan</b>				
<b>Tujuan 5 : Pengentasan Kemiskinan Bertahap dan Komprehensif</b>				
Menurunnya jumlah penduduk miskin	-	Persentase penurunan RTM per tahun.	2,5 %	
	-	Jumlah RTM menjadi RTS per tahun.	25 RTS	1.880 RTS
Meningkatnya jumlah rumah tangga sejahtera	-	Persentase meningkatnya jumlah RTS per tahun.	3,1 %	0,42%
	-	Jumlah rata-rata daya beli masyarakat per hari.	Rp. 300.000	
<b>Tujuan 6 : Kesejahteraan Sosial</b>				
Menurunnya jumlah masyarakat yang menggepeng	-	Jumlah masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap.	750 or	986 or



	-	Jumlah masyarakat yang memiliki keterampilan kerja.	1.200 or	1.368 or
Menurunnya jumlah masyarakat penyandang sosial	-	Jumlah penyandang sosial yang mendapat pelatihan keterampilan kerja.	45 or	50 org
	-	Jumlah yayasan yang menampung masyarakat penyandang sosial.	6 buah	4 buah
<b>Tujuan 7 : Tercapainya Kualitas Hidup Masyarakat</b>				
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	-	Persentase capaian Angka melek huruf	79,44	88,12
	-	Angka rata-rata lama sekolah	12	5,6
Meningkatnya Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	78	78
	-	Jumlah pelatihan pemanfaatan TI	80	100
<b>Tujuan 8 : Terwujudnya Taraf Kesehatan Masyarakat Secara Berkelanjutan</b>				
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	-	Persentase Balita gizi buruk	<1	0,1
	-	Angka Kematian Ibu	22,8	89,34
	-	Angka Kematian Bayi	5	10,6





## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Karangasem tahun 2015 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Karangasem. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja dilingkup SKPD, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Karangasem periode 2010-2015.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Karangasem tahun 2015 ini dibuat dan semoga dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja instansi di masa-masa datang.

Amlapura, 31 Maret 2016

**BUPATI KARANGASEM,**

**I GUSTI AYU MAS SUMATRI, S.Sos, MAP.**



## DAFTAR LAMPIRAN LAKIP KABUPATEN KARANGASEM

1. RPJMD KABUPATEN KARANGASEM
2. IKU KABUPATEN KARANGASEM
3. PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN KARANGASEM TH. 2015
4. RKT KABUPATEN KARANGASEM TH. 2015
5. CASCADING SKPD KABUPATEN KARANGASEM